ABSTRAK

Ratih Kamaliya. 2025. *Tinjauan Yuridis terhadap Penataan Pasar Lama Banjarmasin.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.

Kata Kunci: Penataan Pasar Tradisional, Pasar Lama Banjarmasin, Peraturan Daerah, Hukum Tata Negara, Otonomi Daerah

Latar belakang penelitian ini dengan adanya penataan pasar tradisional yang menjadi isu penting dalam konteks otonomi daerah, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan persaingan dengan pasar modern. Kota Banjarmasin sebagai wilayah yang kaya akan sejarah perdagangan sungai memiliki Pasar Lama sebagai ikon perdagangan tradisional. Namun, perkembangan infrastruktur dan gaya hidup masyarakat turut menggeser peran pasar tradisional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana penataan Pasar Lama telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penataan Pasar Lama Banjarmasin berdasarkan Perda tersebut dan menilai bagaimana konsep hukum tata negara diterapkan dalam proses pembangunan serta pengelolaannya. Penelitian ini juga berusaha mengungkap peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian pasar tradisional dan kehadiran pasar modern di Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Sektor II Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, serta studi pustaka terhadap literatur dan dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya penataan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan ketentuan dalam Perda, khususnya terkait fasilitas parkir dan kebersihan. Di sisi lain, prinsip tata negara telah mulai diterapkan melalui partisipasi masyarakat, zonasi yang jelas, dan strategi pemberdayaan pedagang. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi dan sinergi berkelanjutan antara regulasi, pelaksana, dan masyarakat demi keberlangsungan pasar tradisional.